



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KONSTRUKSI PERTAPIN RAYA

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG

Skema sertifikasi Ahli Teknik Bangunan Gedung merupakan skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Ahli Teknik Bangunan Gedung, Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 33/KPTS/DK/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi, dan Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 03/SE/LPJK/2023 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dan memastikan Kompetensi pada jabatan kerja Ahli Teknik Bangunan Gedung.

Ditetapkan tanggal: 05 September 2023
Oleh:

Agus Supriyandi, S.T.
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal: 05 September 2023
Oleh:



Uray Hadi Saputra, S.T.
Ketua LSP Konstruksi Pertapin Raya

Nomor Dokumen : 008.175/LSP-KOPER/SKEMA/IX/2023
Nomor Salinan : -
Status Distribusi :

√	Terkendali
	Tak Terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja, dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor konstruksi.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor konstruksi.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor konstruksi.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan kerja Ahli Teknik Bangunan Gedung.

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan kerja Ahli Teknik Bangunan Gedung.
- 3.2. Sebagai acuan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dan Asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- 4.7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- 4.8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- 4.9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 4.10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Pada Jabatan Kerja Ahli Teknik Bangunan Gedung.
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.
- 4.12. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.13. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 02/SE/LPJK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi;
- 4.14. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 03/SE/LPJK/2023 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi

5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Skema: ~~KKNI~~ / OKUPASI / ~~KLASTER~~.
- 5.2. Nama Skema: Ahli Teknik Bangunan Gedung
Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.410140.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	F.410140.002.01	Mengendalikan Pengumpulan Data Perancangan Struktur Bangunan Gedung
3.	F.410140.003.01	Membuat Perancangan Struktur Atas Bangunan Gedung Bertingkat Rendah
4.	F.410140.004.01	Membuat Perancangan Struktur Atas Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi
5.	F.410140.005.01	Membuat Perancangan Pondasi Dangkal
6.	F.410140.006.01	Membuat Perancangan Pondasi Dalam
7.	F.410140.007.01	Membuat Perancangan <i>Basement</i>
8.	F.410140.008.01	Membuat Perancangan Gambar Struktur
9.	F.410140.009.01	Menyusun Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung

10.	F.410140.010.01	Mengendalikan Pengumpulan Data dan Informasi Mengenai Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung
11.	F.410140.011.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Pelaksanaan Struktur Bangunan Gedung
12.	F.410140.012.01	Melakukan <i>Review Design</i> Struktur Bangunan Gedung
13.	F.410140.013.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana
14.	F.410140.014.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Baja Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana
15.	F.410140.015.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Bertulang Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana
16.	F.410140.016.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Komposit Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana
17.	F.410140.017.01	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Pracetak Bangunan Gedung sesuai dengan Gambar Rencana
18.	F.410140.018.01	Melaksanakan Uji Kelayakan Fungsi Struktur Bangunan Gedung
19.	F.410140.019.01	Menyiapkan Serah Terima Hasil Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung
20.	F.410140.020.01	Memeriksa Administrasi Rencana Pelaksanaan Struktur Bangunan Gedung
21.	F.410140.021.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Struktur Bangunan Gedung
22.	F.410140.022.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung
23.	F.410140.023.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Baja Bangunan Gedung
24.	F.410140.024.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Bertulang Bangunan Gedung
25.	F.410140.025.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Komposit Bangunan Gedung
26.	F.410140.026.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas Beton Pracetak Bangunan Gedung
27.	F.410140.027.01	Mengintegrasikan, Perancangan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pada Pekerjaan Bangunan Gedung
28.	F.410140.028.01	Membuat Laporan Akhir

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Pendidikan S1/S1 Terapan/D4 Terapan program studi Teknik Sipil atau Arsitektur/ Teknik Arsitektur dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun di bidang teknik bangunan gedung, atau;

Verified
BNSP

- 6.2. Pendidikan Profesi program studi Teknik Sipil atau Arsitektur/ Teknik Arsitektur dengan pengalaman kerja minimal 7 (tujuh) tahun di bidang teknik bangunan gedung, atau;
- 6.3. Pendidikan S2/S2 Terapan/Pendidikan Spesialis 1 program studi Teknik Sipil atau Arsitektur/ Teknik Arsitektur dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun di bidang teknik bangunan gedung, atau;
- 6.4. Doktor/Doktor Terapan/Pendidikan Spesialis 2 program studi Teknik Sipil atau Arsitektur/ Teknik Arsitektur dengan pengalaman kerja minimal 0 (nol) tahun;
- 6.5. Anggota Asosiasi Profesi yang terdaftar di LPJK.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk skema Ahli Teknik Bangunan Gedung mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Copy Ijazah Pendidikan S1/S1 Terapan/D4 Terapan program studi Teknik Sipil atau Arsitektur/ Teknik Arsitektur dan Surat Keterangan Kerja minimal 8 (delapan) tahun di bidang teknik bangunan gedung dari perusahaan/ atasannya atau;

- b. Copy Ijazah Pendidikan Profesi program studi Teknik Sipil atau Arsitektur/ Teknik Arsitektur dan Surat Keterangan Kerja minimal 7 (tujuh) tahun di bidang teknik bangunan gedung dari perusahaan/ atasannya, atau;
 - c. Copy Ijazah Pendidikan S2/S2 Terapan/Pendidikan Spesialis 1 program studi Teknik Sipil atau Arsitektur/ Teknik Arsitektur dan Surat Keterangan Kerja minimal 4 (empat) tahun di bidang teknik bangunan Gedung dari perusahaan/ atasannya, atau;
 - d. Copy Ijazah Doktor/Doktor Terapan/Pendidikan Spesialis 2 program studi Teknik Sipil atau Arsitektur/ Teknik Arsitektur dan Surat Keterangan Kerja minimal 0 (nol) tahun.
 - e. Copy Kartu Tanda Anggota Asosiasi.
 - f. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
 - g. Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan.
 - h. Surat Pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar.
 - i. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian formal.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas, dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen

Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan dinyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/praktek, demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara, dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
- a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya berdasarkan berita acara rapat tim teknis.

9.4.6. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan Dan Pencabutan Sertifikat

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya.

9.6. Surveilans Pemegang Sertifikat/ Pemeliharaan Sertifikat

9.6.1. Pelaksanaan surveilans oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.2. Surveilans dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.

9.6.3. Proses surveilans dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.4. Hasil surveilans dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

9.7.2. Proses pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.

9.7.3. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2. dan 9.3.

9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dan mengembalikan sertifikat kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya.

9.9. Banding

- 9.9.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.